

HALAMAN PENGESAHAN

KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM PEMIDANAAN TENTANG PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA

JURNAL ILMIAH

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan Guna Menyelesaikan
Program Magister Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Oleh :

Gilang Rachma Yustifidya, S.H
11010111400046

Jurnal Ilmiah dengan judul diatas
telah disahkan dan di setujui untuk diperbanyak

Dosen Pembimbing

Dr. Eko Sponyono, S.H.M.H
NIP.195008081978021001

KEBIJAKAN FORMULASI SISTEM PEMIDANAAN TENTANG PIDANA PENJARA MINIMUM KHUSUS DALAM PEMBAHARUAN HUKUM DI INDONESIA

GILANG RACHMA YUSTIFIDYA

Eko Soponyono

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Kebijakan pencantuman ancaman pidana penjara minimum khusus dalam perundang-undangan di luar KUHP merupakan penyimpangan dari sistem dalam KUHP sebab KUHP menganut sistem maksimal dalam merumuskan ancaman pidana. Sehingga aturan atau sistem pemidanaan dalam KUHP hanya berorientasi pada sistem maksimum dan tidak terdapat aturan atau sistem pemidanaan yang menerapkan sistem minimum khusus. Pidana penjara minimum khusus mulai tampak dalam perundang-undangan di luar KUHP.

Rumusan permasalahan yang sekaligus menjadi batasan masalah penelitian ini ialah bagaimana kebijakan formulasi sistem pemidanaan mengenai pidana penjara minimum khusus dalam pembaharuan hukum saat ini. Dan bagaimanakah kebijakan formulasi sistem pemidanaan mengenai pidana penjara minimum khusus dalam pembaharuan hukum di masa yang akan datang.

Penulisan penelitian hukum ini didasarkan pada metode yuridis normatif, dimana dilakukan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Adapun tujuan yang hendak dicapai ialah menjawab rumusan masalah penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kebijakan formulasi pidana penjara minimum khusus dalam perundang-undangan di Indonesia (di luar KUHP) selama ini tidak disertai dengan pengaturan mengenai ukuran lamanya pidana penjara minimum khusus yang seragam serta tidak ada aturan penerapan berlakunya pidana minimum khusus. Keseragaman ukuran tersebut harus memperhatikan perimbangan antara maksimum dan minimum pidananya. Aturan penerapan pidana minimum khusus, yang antara lain berupa pemberatan dan peringanan pidana serta pengecualian berlakunya pidana minimum khusus terhadap pelaku dibawah umur seharusnya diatur secara jelas dan tegas sehingga dapat mempermudah penafsiran dan penerapan berlakunya pidana minimum khusus.

Kata kunci: Pidana Penjara Minimum Khusus, Kebijakan Formulasi

ABSTRACT

The policy mention special minimum punishment of imprisonment in statutory rules outside KUHP is deviation of system in KUHP because KUHP embraces maximal system to formulate punishment threat. Therefore, the sentencing system in KUHP orient maximum system and not there are sentencing system to applying special minimum system.

The formulation of the problem as well as a limitation of this research is how the criminal system of policy formulation regarding the specific minimum imprisonment under current law reform and how about the criminal system policy formulation minimum imprisonment specialized in law reform in the future.

This research represent research of normative juridis, considering the problem of this research is focussed at formulation policy especially which concerning the special minimum punishment of imprisonment.

Based on the survey results revealed that the policy formulation minimum imprisonment of special legislation in Indonesia (outside the Penal Code) for this is not accompanied by the setting of the size of the special minimum length of imprisonment and no uniform application of the rules of criminal force specific minimum. The pattern of the duration special minimum punishment of imprisonment ought to be compiled in uniform pattern by paying attention counter balance between maximum and its minimum of imprisonment.. The order applying of special minimum punishment of imprisonment, which for example in the reduced or increased of punishment and also exception go into effect special minimum punishment of imprisonment to a minor is properli arranged in coherent and clear rule so that can water down applying and interpretation go into effect.

Keyword : special minimum punishment of imprisonment, formulation policy.